

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak faktor memengaruhi kualitas pendidikan, termasuk peran penting guru sebagai agen utama dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar materi, tetapi mereka juga bertindak sebagai motivator, model, dan pemimpin bagi siswa mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana guru melihat situasi di lingkungan kerja mereka.

Semua usaha yang dilakukan untuk memberi orang-orang kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka dikenal sebagai pendidikan. Tidak terkecuali anak-anak dengan kebutuhan khusus, setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus mengalami perubahan yang cukup besar dari pendidikan segregatif, integratif, dan inklusif. Pendidikan inklusif menerima semua keragaman siswa tanpa pengecualian, sehingga siapa pun peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum yang mereka inginkan.

Pendidikan inklusif adalah prinsip yang mengutamakan hak setiap anak untuk akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang mencakup berbagai kebutuhan fisik dan intelektual, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan potensi mereka.

Meskipun ada upaya dan kebijakan yang dibuat untuk memasukkan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan formal, masih ada beberapa masalah dalam menerapkan praktik inklusif di sekolah-sekolah. Sebagai peran penting dalam proses pembelajaran, guru bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa dan menerapkan pendekatan inklusif. Guru reguler mengajar semua siswa di dalam kelas, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Maka maksud guru reguler dalam pembahasan ini adalah guru tanpa latar belakang

Pendidikan Khusus (PKh) yang mengajar di sekolah yang mendukung pendidikan inklusif.

Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk memasukkan anak-peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, di mana guru harus menggunakan berbagai metode penilaian, bekerja sama, dan berbagai pendekatan pengajaran¹, maka dari itu tujuan ini dapat dicapai dengan perubahan perilaku khususnya di lingkungan sekolah. Tinjauan pendidikan inklusif sejalan dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sangat penting sehingga menciptakan hal yang positif suasana pembelajaran dapat dibangun dengan rasa percaya, tanggung jawab sosial dan tanpa kebebasan orang lain.²

Untuk melaksanakan pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang cara berinteraksi dengan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar tidak ada hambatan dan kesalahpahaman, strategi dan metode yang tepat serta sistematis diperlukan untuk mendorong gagasan pendidikan inklusif kepada masyarakat. Semua kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran harus diketahui oleh guru. Untuk memastikan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mendapat fasilitas sesuai dengan kebutuhannya serta guru harus mampu memahami berbagai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.

Pada kenyataannya, persepsi dan pengalaman guru dapat sangat berbeda tergantung pada banyak hal, seperti jenis sekolah, lokasi geografis, sumber daya yang tersedia, dan kebijakan pendidikan yang diterapkan. Beberapa guru mungkin menghadapi masalah khusus terkait infrastruktur pendidikan yang terbatas, sementara yang lain mungkin menghadapi kebijakan evaluasi kinerja yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kelas.

¹ Rouse, M. (2007). Enhancing Effective Inclusive Practice: Knowing, Doing and Believing Kairaranga , 7. h.8–13.

² Ediyanto, E., Kawai, N., Hayashida, M., Matsumiya, N., Siddik, M. A. B., & Almutairi, A. T. (2021) Indonesian Teachers' Attitudes Toward Inclusive Education. Discourse and Communication for Sustainable Education. h. 31–44.

Kurangnya tenaga pendidik yang mampu menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus dan kurangnya kesiapan guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini yang akhirnya menimbulkan dari banyaknya kejadian peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tidak diberi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dan seringkali dibiarkan karena ketidaktahuan guru dalam memberikan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Menurut observasi yang telah dilakukan peneliti di salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, peneliti menemukan bahwa sebagian besar guru adalah lulusan pendidikan. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa guru yang mengabaikan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran mereka. Peneliti mewawancarai lima guru di institusi tersebut. Peneliti ingin tahu bagaimana sekolah mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan mempertimbangkan jawaban dari lima guru berbeda, ada yang menjawab “biarkan saja dia di sana, dia pun juga tidak bisa mengikuti pembelajaran” kemudian ada juga yang menjawab, “dia sulit diberitahu jadi saya diamkan saja dia” dan masih banyak lagi.

Dari fakta yang telah ditemukan, ada beberapa guru yang mengabaikan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kurangnya pengetahuan guru terhadap PDBK, peran guru yang kurang baik dalam menangani PDBK, dan sikap guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang masih kurang memperhatikannya saat di dalam kelas. Fakta-fakta ini merupakan masalah yang timbul dari para guru dalam menghadapi PDBK di sekolah inklusif.

Pendidikan inklusif mulai diperkenalkan pada tahun 1994 dalam konferensi Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semua yang diselenggarakan oleh UNESCO di Salamanca, Spanyol. Pada konferensi tersebut didapatkan hasil pernyataan terkait pendidikan inklusif, yaitu “Pendidikan inklusif adalah suatu proses yang memungkinkan semua anak belajar bersama-sama di sekolah-sekolah biasa dengan memperhatikan

kebutuhan individual mereka, tanpa memandang perbedaan atau kesulitan. Hal ini melibatkan perubahan dalam kurikulum, pengajaran, dan pendekatan lainnya, yang akan memungkinkan sekolah dapat memenuhi kebutuhan semua anak dengan memperhatikan keberagaman kemampuan dan bakat mereka.”³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus bisa menjadikan PDBK tidak dipandang berbeda dengan siswa pada umumnya. Pernyataan Salamanca memberikan dorongan kepada munculnya kebijakan penerimaan ABK di sekolah inklusif untuk dapat dilayani kebutuhan belajarnya. Hal ini dibuktikan dalam munculnya Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan pendidikan inklusif yaitu peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.⁴

Sedangkan menurut *National Council for Special Education* (NCSE) bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu :

1. *Mild General Learning Disability* yaitu anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbicara dan berbahasa.
2. *Moderate General Learning Disability* yaitu anak yang mengalami keterlambatan secara signifikan dalam perkembangan bicara, tulis-menulis, jalan, membaca, dan sebagainya. Dalam tahap ini, cacat fisik, autisme, kesehatan, dan kesulitan dalam mengontrol emosi juga termasuk didalamnya.
3. *Severe / Profound General Learning Disability* yaitu anak yang mengalami penundaan secara serius dalam perkembangan terhadap kesadaran dan pemahaman tentang lingkungan yang disebabkan atas kesulitan kondisi anak untuk

³ UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>

⁴jdih.kemdikbud.go.id. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, diakses Mei 2024. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=1697

berkomunikasi, dimana dalam tahap ini, anak akan selalu bergantung pada orang lain dalam melakukan kebutuhan dasarnya.⁵

Hingga saat ini, penerimaan dan pelayanan ABK terus diperhatikan. Hal ini menunjukkan dari keinginan pemerintah membuka seluas-luasnya proses interaksi yang sehat oleh PDBK dan siswa pada umumnya sangat tinggi. Keinginan ini pula ditunjukkan oleh pemerintah dari satuan pendidikan dasar sampai satuan pendidikan tinggi. Dampak yang muncul dari kebijakan pemerintah tersebut adalah keterbukaan terhadap penerimaan PDBK.

Dukungan terhadap dampak penerimaan dari ABK adalah berupa pembinaan-pembinaan guru sekolah dasar tentang guru pendidikan inklusif, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan yaitu berupa pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Pelatihan ini ditujukan dalam rangka bagaimana pemahaman guru dan prakteknya terhadap PDBK.

Berdasarkan temuan dari Hanifah dkk, masalah yang ditemukan adalah tantangan di sekolah tingkat dasar terkait persepsi guru yang berupa diskriminasi terhadap PDBK.⁶ Sedangkan temuan masalah dari Damastuti dan Rapisa adalah dapat menerima keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Para guru dapat menghargai perbedaan individu, dan mendorong semua siswa untuk dapat saling menghargai perbedaan, kerjasama, tolong menolong dan empati.⁷

Selanjutnya ditemukan persepsi guru dari Hidayah dkk, bahwa ada guru yang dapat menangani PDBK dengan beberapa cara menghadapinya melalui memahami PDBK tersebut sebelum melanjutkan pembelajaran untuk mencapai optimalisasi pembelajaran walaupun guru tersebut tanpa

⁵ncse.ie. National Council for Special Education, diakses Mei 2024. https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/Pamphlet-6-GLD-01_09_14.pdf

⁶ Hanifah, D.S., Haer, A.B., Widuri, S., & Santoso, M.B. (2022). TANTANGAN peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) DALAM MENJALANI PENDIDIKAN INKLUSI DI TINGKAT SEKOLAH DASAR. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*.

⁷ Damastuti, E., Rapisa, D. R. (2021). Kecenderungan Penerimaan Guru terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Dasar. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*. 19(2). h.189.

dibekali dengan pelatihan.⁸ Sedangkan temuan persepsi dari Haryono dkk bahwa guru kekurangan pelatihan atau layanan untuk menunjang pengetahuan terhadap PDBK, menurut penelitiannya hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif.⁹

Kebijakan terhadap pendidikan inklusif bersifat menyeluruh termasuk wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dari hasil temuan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya ada yang baik dan ada pula yang mendiskrimasi. Kemudian juga ditemukan ada yang baik persepsinya tanpa adanya pelatihan dan ada pula yang masih memerlukan pelatihan atau pembekalan karena masih merasa tidak paham. Maka dari itu pertanyaannya adalah apakah persepsi guru terhadap PDBK di SDN wilayah Kecamatan Cakung sama dengan temuan-temuan yang ditemukan? Bagaimana jika di Kecamatan Cakung?

Penelitian terhadap persepsi guru reguler ini memiliki berbagai guna yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi para guru, pengembangan kebijakan yang lebih efektif, serta dapat mengumpulkan umpan balik untuk pengembangan dan penyempurnaan program tersebut.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Survei Persepsi Guru Reguler Terhadap Keberadaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang masih minim, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

⁸ Hidayah, R, dkk. (2021). Persepsi dan Peran Guru Terhadap Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*. 18(2). h.340.

⁹ Haryono, dkk. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 32(2). h. 121.

2. Kesadaran guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang masih kurang paham dalam menghadapi peserta didik berkebutuhan
3. Kurangnya peran guru dalam memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, peneliti membatasi ruang lingkup pembatasan menjadi:

1. Persepsi guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
2. Guru yang dimaksud adalah guru di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif yang terdapat peserta didik berkebutuhan khusus di kelasnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka masalah yang menjadi fokus penelitian adalah : Bagaimanakah persepsi guru reguler terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur?

E. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru dalam memahami pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dalam pendidikan khusus, terutama dalam mengetahui persepsi guru dalam memahami pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar yang menyelenggarakan

pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Cakung Jakarta Timur sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan secara praktis

a) Bagi Guru, dapat memahami betapa pentingnya bagi guru untuk memahami peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Serta agar mereka dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

b) Bagi Sekolah, data persepsi guru dapat digunakan untuk merancang kebijakan sekolah yang mendukung inklusif.

